

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Kabupaten Flores Timur tahun 2020 merupakan sebuah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi), yang diemban oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Flores Timur.

LAKIP tahun 2020 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2020, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berbagai data dan informasi yang disajikan dalam laporan ini merupakan output pelaksanaan program dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan terdiri dari 9 program yakni 5 program OPD dan 4 program urusan (urusan pemberdayaan masyarakat dan desa) serta 38 kegiatan..

Kami menyadari bahwa outcome terhadap pelaksanaan program dan kegiatan ini masih jauh dari harapan kita semua terutama masyarakat. Untuk itu maka kritik dan saran dari berbagai pihak, sangat dibutuhkan demi peningkatan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Akhirnya laporan ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Flores Timur, sebagai input untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Flores Timur.



Larantuka, Januari 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten Flores Timur,

Rufus Koda Teluma, S.Sos.

Pembina Utama Madya

Nip. 19690725 199703 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

a. Kedudukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur, disebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur Pelaksana dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati Flores Timur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas pokok Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur sesuai Perda tersebut adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- b. Pelaksanaan kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- c. Pelaksanaan administrasi Dinas
- d. Pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian urusan pemberdayaan masyarakat dan desa
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

B. LINGKUNGAN STRATEGIS

a. Sumber Daya Manusia

Guna memperlancar pelaksanaan tugas dan Fungsi , maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur didukung oleh potensi sumber daya manusia (SDM) sebanyak 23 orang (dua puluh tiga) PNS dan 24 (dua puluh empat) orang tenaga honorer (per 31 Desember 2019), dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Menurut Golongan :

- | | | |
|---|--------------|------------|
| - | Golongan IV | : 6 orang |
| - | Golongan III | : 13 orang |
| - | Golongan II | : 4 orang |

2. Menurut Eselonering :
 - Eselon IIa : 1 orang
 - Eselon IIIa : 1 orang
 - Eselon IIIb : 4 orang
 - Eselon IVa : 7 orang
 - Fungsional Umum : 10 orang
3. Menurut Jenis Kelamin :
 - Laki-laki : 15 orang
 - Perempuan : 8 orang
4. Menurut Tingkat Pendidikan:
 - Magister/S2 : 1 orang
 - Sarjana/S1 : 13 orang
 - D III : 2 orang
 - SLTA : 7 orang
 - SLTP : 0 orang
 - SD : 0 orang
5. Tenaga honorer : 24 orang
 - Laki-laki : 13 orang
 - Perempuan : 11 orang

b. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur berdasarkan Perda Kabupaten Flores Timur nomor 76 tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Bupati Flores Timur Nomor 80 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur yakni sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi
3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari :
 - a. Seksi Penataan Potensi Ekonomi Desa
 - b. Seksi Peningkatan Kapasitas SDM
 - c. Seksi Teknologi Tepat Guna
4. Bidang Bina Kelembagaan Desa, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Kelembagaan Tradisional
 - b. Seksi Bina Kelembagaan Sosial Budaya

- c. Seksi Bina Kelembagaan Fungsional Desa
 - 5. Bidang Bina Pengembangan Ekonomi Desa, terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Kerjasama Desa
 - b. Seksi Bina Usaha Masyarakat
 - c. Seksi Bina Usaha Desa
 - 6. Bidang Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa , terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa
 - b. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Otonomi dan Administrasi Desa
 - c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kelembagaan Pemerintahan Desa
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- Bagan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur, dapat dilihat pada *lampiran 1*.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan :
 - Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah secara periodik sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*good governance*).
 - Untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan program / kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 sesuai perencanaan strategis dalam bentuk laporan.
2. Manfaat :

Sesuai Keputusan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penetapan Kinerja , maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur ini dapat bermanfaat untuk :

 - Mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
 - Menjadikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai OPD yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.
 - Menjadi masukan (Input) dan umpan balik dari pihak – pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur selama tahun 2020. Capaian kinerja 2020 tersebut diukur dan dinilai berdasarkan rencana kinerja dan penetapan kinerja tahun 2020 dan Revisi Perjanjian Kinerja 2020 .

Rencana kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur tahun 2020 merupakan jabaran dari Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2020. Indikator yang ditetapkan atas rencana kinerja ini sedapat mungkin menggambarkan satuan atau dimensi yang terukur dan operasional. Dengan demikian, penilaian kinerja yang dilakukan atas dasar rencana kinerja ini diharapkan dapat menggambarkan capaian kuantitatif dari setiap sasaran.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Flores Timur tahun 2020 dapat digambarkan sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya mengacu pada kebijakan pembangunan kabupaten lima tahun ke depan berdasarkan Visi Kabupaten Flores Timur yaitu “ FLORES TIMUR SEJAHTERA DALAM BINGKAI DESA MEMBANGUN, KOTA MENATA ” .

Perntaan Visi itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Flores Timur Sejahtera adalah Kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Flores Timur agar dapat hidup layak dan harmonis serta mampu mengembangkan diri dan lingkungannya.
- Desa Membangun Kota Menata adalah Desa/kota yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya pada aspek Sosial, Ekonomi dan Ekologi sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk permukiman dan pelayanan kemasyarakatan. Desa membangun kota menata merupakan satu kesatuan gerak seluruh masyarakat Flores Timur, baik yang berada di desa maupun di kota untuk mewujudkan kemandirian dan menggarakkan sektor-sektor strategis ekonomi local menuju Flores Timur sejahtera.

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut perlu didukung dengan misi-misi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Misi Kesatu	Selamatkan Orang Muda Flores Timur
Misi Kedua	Selamatkan Infrastruktur Flores Timur
Misi Ketiga	Selamatkan Tanaman Rakyat Kabupaten Flores Timur
Misi Keempat	Selamatkan Laut Flores Timur
Misi Kelima	Reformasi Birokrasi

Utuk mendukung pencapaian visi dan misi Daerah dan berpedoman pada Tujuan, sasaran , strategi serta arah kebijakan dari pembangunan Daerah maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merumuskan arah kebijakan, Tujuan serta sasaran strategis untuk menjalankan tugas dan fungsinya demi tercapainya tujuan dari pembangunan daerah lima Tahun kedepan sesuai dengan **Misi Kesatu** dan **Misi Kelima** yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Misi Kesatu : Selamatkan Orang Muda Flores Timur dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur ke depan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan orang muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri pada aspek ekonomi, sosial dan Budaya

Misi Kelima : Reformasi Birokrasi dimaksudkan agar terwujudnya Pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip Good Governance dan Clean Government

2. Faktor Penentu keberhasilan

Pengidentifikasian faktor – faktor penentu keberhasilan merupakan faktor penting dalam perencanaan strategis. Hal ini harus dilalui agar Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis. Faktor – faktor penentu keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Faktor-faktor penentu keberhasilan tersebut dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut :

1. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur.
2. Fasilitas penunjang (peralatan / perlengkapan) kantor.
3. Adanya perangkat peraturan daerah (Perda) yang mendukung penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
4. Adanya kemitraan antara pemerintah, LSM, dunia usaha/swasta, perguruan tinggi, tokoh agama dan komponen masyarakat.
5. Kepedulian masyarakat terhadap program-program pemberdayaan dan dukungan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa
6. Budaya gotong royong.
7. Kelembagaan masyarakat.
8. Dukungan dana pemerintah pusat dan propinsi.
9. Dukungan regulasi di tingkat propinsi dan pusat.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan.

Untuk itu dengan mengacu pada visi dan misi pembangunan daerah lima tahun ke depan maka Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa dapat menjabarkan Tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut

a. Tujuan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

1. Meningkatkan Peran kelembagaan masyarakat serta kemandirian masyarakat dalam membangun desa
2. Meningkatkan usaha ekonomi produktif masyarakat dan penguatan lembaga ekonomi desa/kelurahan
3. Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan

pembangunan di desa

4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif
5. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan di perdesaan

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

1. Meningkatnya peran dan keberdayaan masyarakat di perdesaan dalam pembangunan
2. Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan ekonomi masyarakat
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Desa
4. Meningkatnya kapasitas dan kemampuan aparatur pemerintah desa
5. Terwujudnya peran perempuan dalam pembangunan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan

4. Program dan Kegiatan

Program Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur sebagai penjabaran dari tujuan strategis adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam membangun desa
4. Program Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa
5. Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

B. PERENCANAAN KINERJA

1. Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran tahun 2020 merupakan perencanaan kebutuhan anggaran yang digunakan untuk membiayai seluruh rangkaian kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang bersumber dari APBN DAN APBD II, seperti terlihat pada rincian berikut :

a. Belanja tidak langsung :

Anggaran pada tahun 2020 sebesar Rp. 1.795.071.526,- untuk membiayai belanja pegawai (Gaji dan Tunjangan).

b. Belanja langsung :

Sumber dana APBD II (DAK – DAU) :

Total anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 1.358.004.973,- yang terdiri dari :

- Belanja Pegawai : Rp. 403.240.000,-
- Belanja Barang dan Jasa: Rp. 954.764.973,-
- Belanja Modal : Rp , -

2. Perencanaan Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan dan perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Sasaran, indikator kinerja, target dan capaian kinerja yang diharapkan dapat terwujud pada tahun 2020, adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya peran dan keberdayaan masyarakat di Perdesaan dalam pembangunan		
1.1	Terbentuknya Sistem Desa Siaga	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	100 orang
1.2	Meningkatnya sistem kerja jejaring desa siaga	Jumlah desa siaga yang dibina	40 desa Siaga
1.3	Bertambahnya Jumlah Desa Siaga	Jumlah Desa Siaga yang dibentuk	4 Desa Siaga
1.4	Meningkatnya kapasitas kader posyandu/peningkatan strata posyandu	Jumlah Kader posyandu	650 kader
1.5	Terpadunya kegiatan Posyandu	Frekuensi jambore kade	2 kali
1.6	Terintegrasinya program/kegiatan posyandu	Frekuensi Rakor Pokjanal Posyandu	2 kali
1.7	Terevaluasinya semua program pemberdayaan masyarakat	Terlaksananya Rapat koordinasi Program Pemberdayaan	229 desa/kel
2.	Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan ekonomi masyarakat		
2.1	Tersedianya laporan hasil pendampingan usaha desa dan kelompok ekonomi masyarakat	Jumlah usaha desa dan kelompok ekonomi yang didampingi	176 kelompok
2.2	Terbentuknya BUMDES/BUMDES bersama	Jumlah desa yang difasilitasi	24 Desa
2.3	Meningkatnya pengetahuan dalam pengelolaan BUMDES	Jumlah Peserta Bimtek	105 orang
3.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa		
3.1	Meningkatnya semangat gotong-royong masyarakat di tingkat Desa/Kel	% masyarakat yang mengikuti BBGRM	20 %

3.2	Meningkatnya partisipasi seluruh komponen masyarakat dalam membangun desa	% desa Peserta Lomba	100 %
3.3	Meningkatnya pelayanan secara efektif dan efisien serta mempercepat pembangunan di desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	21 desa
4.	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan aparatur pemerintah desa		
4.1	Meningkatnya kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan desa/kelurahan	Jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti Bimtek	50 orang
4.2	Meningkatnya kapasitas aparatur Pemdes dan BPD	Terlaksananya pendampingan dan pembinaan terhadap aparat pemerintah desa dan BPD	229 desa
4.3	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa	Terlaksananya pendampingan Penyusunan RPJM Desa, RKP Desa	229 desa
4.4	Tersedianya Dokumen APBDes	Terlaksananya Evaluasi Rancangan APBDes	229 desa
4.5	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa dan terdatanya aset desa secara baik	Terlaksananya fasilitasi dan pendampingan	229 desa
4.6	Terevaluasinya Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDesa)	Terlaksananya Evaluasi RKPDesa	229 desa
5.	Terwujudnya peran wanita dalam pembangunan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan		
5.1	Meningkatnya kapasitas kader/pengurus PKK	Jumlah kader yang ditingkatkan kapasitasnya	190 orang
5.2	Meningkatnya kesejahteraan keluarga anggota PKK di desa/kel	Jumlah kelompok UP2K PKK yang dilatih	10 Kelompok

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur adalah perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Bab ini akan menyajikan hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi pencapaian kinerja termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan atau kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah – langkah yang diambil guna mengatasi hambatan atau kendala dan permasalahannya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran yang dijabarkan di dalam program / kegiatan tahun 2020 yang tertuang di dalam komitmen / perjanjian kinerja antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur dengan Bupati Flores Timur.

Sasaran yang ingin dicapai adalah 5 sasaran strategis yang mendukung Visi dan Misi Daerah yang tercantum di dalam dokumen revisi Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2020 yaitu :

6. Meningkatnya peran dan keberdayaan masyarakat di perdesaan dalam pembangunan
7. Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan ekonomi masyarakat
8. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun Desa
9. Meningkatnya kapasitas dan kemampuan aparatur pemerintah desa
10. Terwujudnya peran perempuan dalam pembangunan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan

Namun di awal tahun 2020 munculnya Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah telah mengeluarkan stimulus untuk menjaga masyarakat dan perekonomian, melalui Perppu No. 1/2020 dan Perpres No. 54/2020. Namun seiring perubahan dampak Covid-19 yang semakin meluas, diperlukan upaya penanganan bersama antara Pemerintah dan Pemda melalui **realokasi dan refocusing anggaran belanja APBN dan APBD TA 2020 untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19. Untuk itu, Pemda perlu melakukan penyesuaian APBD TA 2020 sesuai pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD**

Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19, sehinga OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Juga telah melakukan Realokasi dan Refocusing Anggaran Belanja untuk penanganan Covid 19. Untuk itu dalam Laporan Capaian Kinerja ini terdapat beberapa Program/ Kegiatan yang tidak dapat mencapai target yang ditetapkan karena Realokasi dan Refocusing belanja tersebut.

Untuk mencapai sasaran di atas, dalam tahun anggaran 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah mengalami Realokasi dan Refocusing anggaran maka total alokasi anggaran dari APBD II sebesar Rp. 4.790.213.755,00 yang terdiri dari Rp. 1.795.071.526,00 untuk belanja tidak langsung dan Rp. 1.358.004.973,00 untuk belanja langsung.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, apabila semakin tinggi realisasi maka menunjukan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukan pencapaian kinerja semakin buruk.

Perlu diberi catatan bahwa pencapaian kinerja yang buruk bukan berarti OPD tidak maksimal dalam pelaksanaan program dan kegiatan tetapi disebabkan karena adanya realokasi dan refocusing anggaran dimaksud.

Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Nilai capaian kinerja yang diperoleh tersebut kemudian dikelompokan menurut skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- 85 – 100 : sangat baik
- 75 - 84 : baik
- 55 - 74 : cukup baik
- 0 – 54 : kurang baik

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2020 :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KATEGORI
1.	Meningkatnya peran dan keberdayaan masyarakat di perdesaan dalam pembangunan	- Jumlah Desa Siaga yang dibina	40 desa Siaga	19 Desa Siaga	47,5	Kurang baik
		- Jumlah Kader Posyandu	650 kader	290 kader	44,62	Cukup Baik
		- Terlaksananya Rapat koordinasi Program	229 desa	229 desa	100	Sangat Baik

		pemberdayaan				
2.	Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan ekonomi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Usaha Desa dan Kelompok Ekonomi desa yang dibina - Jumlah Desa yang difasilitasi 	176 Kelompok 24 desa	32 kelompok 12 BUMDES	18,19 50	Kurang Baik Kurang Baik
3.	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan aparatur pemerintah desa	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti Bimtek - Terlaksananya pendampingan dan pembinaan terhadap aparat Pemdes dan BPD - Jumlah Desa yang didampingi - Terlaksananya Evaluasi Rancangan APBdes - Terlaksananya fasiltasi dan pendampingan - Terevaluasinya Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDesa 	50 orang 229 desa 229 desa 229 desa 229 desa 229	50 orang 229 desa 229 Desa 229 desa 229 desa 229 desa	100 100 100 100 100	Sangat Baik Sangat Baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik Sangat baik
5.	Terwujudnya peran wanita dalam pembangunan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kader yang ditingkatkan kapasitasnya - Terlaksananya pelatihan dan pembinaan UP2K PKK di desa/Kel 	190 orang 10 kelompok	95 kader 10 kelompok	50 100	Kurang Baik Sangat Baik

Program / kegiatan yang mendukung sasaran :

Sasaran 1 : Meningkatnya peran dan keberdayaan masyarakat di perdesaan dalam pembangunan

Untuk mendukung sasasaran 1, pada tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan 1 program dan 3 kegiatan, seperti terlihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Program / kegiatan yang mendukung	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	<i>Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan</i>						
Jumlah Desa siaga yang dibina	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Jejaring Desa Siaga	40 desa siaga	19 desa siaga	47,5	24.170.000	24.170.000	100
Jumlah Kader Posyandu	Pendampingan dan pembinaan kader posyandu	650 kader	290 kader	44,62	40.265.000	40.265.000	100
Terlaksananya Rapat koordinasi Program pemberdayaan	- Koordinasi Program pemberdayaan Masyarakat	229 desa	229 desa	100	65.570.000	65.555.000	99,98

Total anggaran untuk mendukung sasaran 1 ini sebesar Rp. 130.005.000,- dengan rata – rata penyerapan anggaran untuk ke 3 (tiga) kegiatan yang mendukung program ini adalah 99,99 %. Rata – rata capaian kinerja untuk sasaran I adalah 64,04 % atau dengan predikat Cukup baik.

Sasaran 2 : Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan ekonomi masyarakat

Untuk mendukung sasasaran 2, pada tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan 1 program dan 2 kegiatan seperti terlihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Program / kegiatan yang mendukung	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	<i>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</i>						
Jumlah usaha desa dan kelompok ekonomi yang didampingi	- Pendampingan usaha desa dan kelompok ekonomi masyarakat	176 klmpk	32 klmpk	18,19	21.010.000	20.960.000	99,76

Jumlah desa yang di fasilitasi	- Fasilitasi Pembentukan BUMDes/BUMDes Bersama	22 BUMDes	12 BUMDes	50	31.993.325	31.943.600	99,84
--------------------------------	--	-----------	-----------	----	------------	------------	-------

Total anggaran untuk mendukung sasaran 2 ini sebesar Rp. 52.903.600,- dengan rata – penyerapan anggaran untuk ke 2 (dua) kegiatan yang mendukung program ini adalah 99,81 %. Rata – rata capaian kinerja untuk sasaran 2 pada tahun 2020 adalah 32,67% atau dengan predikat kurang baik.

Capaian target pada Program/kegiatan ini dengan rata-rata kurang baik disebabkan terjadi realokasi dan refofusing anggaran untuk penanganan Covid 19.

Sasaran 3 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Untuk mendukung sasasaran 3, pada tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menganggarkan belanja untuk 3 kegiatan tetapi anggaran pada sasaran 3 ini di realokasikan untuk penanganan Covid 19 untuk melaksanakan 1 program dan 3 kegiatan seperti terlihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Program / kegiatan yang mendukung	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	-						
	-						

Sasaran 4 : Meningkatnya kapasitas dan kemampuan aparatur pemerintah desa

Untuk mencapai sasasaran 4, pada tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan 1 program dan 6 kegiatan seperti terlihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Program / kegiatan yang mendukung	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	<i>Program Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah desa</i>						
Jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti Bimtek	Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa/Kelurahan	50 orang	50 orang	100	56.740.500	56.740.500	100
Terlaksananya pendampingan dan pembinaan	Pendampingan dan pembinaan terhadap	229 desa	229 desa	100	76.851.000	76.626.000	99,71

terhadap aparat Pemdes dan BPD	Pemerintah Desa dan BPD						
Jumlah Desa yang didampingi	penyusunan RPJM Desa, RKP desa	229 desa	229 Desa	100	35.687.600	35.548.500	99,61
Terlaksananya Evaluasi Rancangan APBDes	Evaluasi rancangan peraturan tentang APBDes	229 desa	229 desa	100	29.998.675	29.988.675	99,97
Terlaksananya faslitasi dan pendampingan	Fasilitasi dan pendampingan pengelolaan Keu. Dan Aset Desa	229 desa	229 desa	100	31.345.975	31.345.975	100
Terevaluasinya Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDesa	Evaluasi RKPDesa	229	229 desa	100	41.940.000	41.940.000	100

Dengan adanya pendampingan-pendampingan yang dilakukan di desa terkait pengelolaan Dana Desa yang maksimal menyebabkan dampak yang sangat bagus untuk Perkembangan Desa dan perubahan status desa yang dapat terlihat pada Tabel dibawah ini.

PROGGRES IDM :

Data Awal 2015- 2017	Jumlah	Status IDM Tahun 2018	Status IDM 2019	Status IDM 2020
Desa Sangat Tertinggal	9 Desa	6	1	0
Desa Tertinggal	195 Desa	141	61	30
Desa Berkembang	25 Desa	80	156	177
Desa Maju	0	2	10	21
Desa Mandiri	0	0	1	1
TOTAL	229	229	229	229

Dari Data di tahun 2015 sesuai Data Kemendes, PDT dan Transmigrasi untuk Kabupaten Flores Timur terdapat 9 (sembilan) Desa Sangat Tertinggal, 195 Desa Tertinggal dan 25 Desa Berkembang. Pada tahun 2018 dilakukan pemutakhiran Data IDM untuk tahun 2017 dan dari target yang ditetapkan untuk Tahun 2018 Untuk Desa Sangat Tertinggal dari 9 Desa Sangat Tertinggal tersisa 6 Desa , untuk Desa Tertinggal dari 195 Desa menjadi 141 Desa, Desa Berkembang dari 25 Desa Naik menjadi 80 Desa sedangkan untuk desa Maju dari 0 desa menjadi 2 Desa yang naik statusnya dari Desa Berkembang ke Desa Maju sehingga di tahun 2018 dari total 229 desa mengalami perubahan peningkatan status desa sebanyak 117 Desa. Untuk Tahun 2019 status IDM mengalami perubahan yang sangat baik, dapat dilihat dari tabel di atas dimana pada tahun 2019 sudah ada 1 Desa dengan status Mandiri dan untuk Desa Sangat tertinggal yang pada Tahun 2018 masih terdapat 6 Desa Sangat Tertinggal, pada

tahun 2019 tersisa 1 Desa. Untuk Tahun 2020 status Desa mengalami perubahan peningkatan status desa yang cukup baik terlihat dari angka Desa Tertinggal yang sudah tersisa 30 Desa dari 195 Desa tertinggal pada awal tahun perencanaan dan Desa Sangat Tertinggal dari 1 desa menjadi 0.

Total anggaran untuk mendukung sasaran 4 ini sebesar Rp. 272.653.750,- dengan rata – rata penyerapan anggaran untuk mendukung program ini adalah 99,86 % . Rata – rata capaian kinerja untuk sasaran 4 adalah 100 % atau dengan predikat sangat baik.

Sasaran 5 : Terwujudnya peran wanita dalam pembangunan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan

Untuk mencapai sasaran 5, pada tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melaksanakan 1 program dan 2 Kegiatan seperti terlihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Program / kegiatan yang mendukung	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Jumlah Kader yang ditingkatkan kapasitasnya	<i>Program Peningkatan peran Perempuan di Perdesaan</i> - Peningkatan kapasitas organisasi PKK	190 orang	95 orang	50	112.521.500	112.521.500	100
Jumlah Kelompok UP2K PKK yang dilatih	- Pelatihan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (UP2K) PKK	10 kelompok	10 kelompok	100	79.227.400	79.227.400	93,45

Total anggaran untuk mendukung sasaran 5 ini sebesar Rp. 191.748.900,- dengan rata – rata penyerapan anggaran untuk mendukung program ini adalah 100 % . Sedangkan untuk Tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 183.683.900 (Mengalami Peningkatan anggaran di tahun 2020). Rata – rata capaian kinerja untuk sasaran 5 adalah 75 % atau dengan predikat Baik.

2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja pada tahun 2020 dengan tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2019		2020		
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya peran dan keberdayaan masyarakat di perdesaan dalam pembangunan	- Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan	100 orang	100 orang	100 orang	0	0
		- Jumlah Desa Siaga yang dibina	38 desa	38 desa	40 desa	19 desa	47,5 %
		- Jumlah Desa siaga yang dibentuk	4 Desi	4 Desi	4 Desi	0	0%

		- Jumlah kader ponyandu yang didampingi dan di bina	653	220	650	290	44,61%
		- Frekuensi jambore kader	2 kali	2 kali	2 kali	0	0
		- Frekuensi Rakor Pokjanal Posyandu	2 kali	2 kali	2 kali	0	0
		- Terlaksananya Rapat koordinasi Program pemberdayaan	250 desa/kel	148 desa/kel	229 desa	229 desa	100 %

Tabel di atas menunjukan bahwa capaian kinerja pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan karena adanya Realokasi dan Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19 .

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2019		2020		
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2.	Meningkatnya usaha ekonomi produktif dan pendapatan ekonomi masyarakat	- Jumlah Usaha Desa dan kelompok ekonomi yang didampingi	176 klmpk	191 klmpk	176 kelompok	32 kelompok	18,19
		- Jumlah desa yang difasilitasi	22 Desa	27 BUMDes	24 Desa	12 BUMDES	50
		- Jumlah Peserta Bimtek	93 orang	93 orang	105	0	0

Tabel di atas menunjukan bahwa jumlah Bumdes yang terbentuk di tahun 2020 juga mengalami penurunan karena keterbatasan anggaran akibat Realokasi dan Refocusing anggaran untuk penanganan Covid 19.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2019		2020		
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	- Jumlah desa yang didampingi	229 desa	229 desa	20 %	0	0
		- Jumlah desa/kel yang mengikuti perlombaan	250 Desa/ Kel (229 Desa, 21 Kel)	229 desa/kel (208 Desa, 21 Kel)	100 %	0	0

		- Jumlah Desa yang difasilitasi			21 Desa	0	0
--	--	---------------------------------	--	--	---------	---	---

Pada Tahun 2020 Anggaran untuk 3 kegiatan diatas telah direalokasi untuk Penanganan Covid 19 sehingga target kinerjanya 0

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2019		2020		
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4.	Meningkatnya Kapasitas dan kemampuan aparatur pemerintah desa	Jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti Bimtek	0	0	50 orang	50 orang	100%
		- Terlaksananya pendampingan dan pembinaan terhadap aparat Pemdes dan BPD	0	0	229 desa	229 desa	100 %
		- Jumlah desa yang didampingi	229 desa	229 desa	229 desa	229 desa	100 %
		- Terlaksananya pendampingan penerapan standar SPM pada desa/kel	27 desa	27 desa	0	0	0
		- Terlaksananya pendampingan dan penyusunan profil desa/kel	39 desa	39 desa	0	0	0
		- Terlaksananya Evaluasi Rancangan APBDes	229	229	229	229	100
		- Terlaksananya faslitasi dan pendampingan	229	229	229	229	100
		- Terevaluasinya Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDesa	0	0	229	229	100

Tabel di atas menunjukan bahwa capaian target kegiatan pada sasaran ke empat ini sesuai dengan target yang diharapkan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2019		2020		
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
5.	Terwujudnya peran wanita dalam pembangunan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan	- Jumlah kader yang ditingkatkan kapasitasnya	190 kader	0	190 orang	95	50 %
		- Jumlah Kelompok UP2K PKK yang dilatih	10 klmpk	0	10 klmpk	10	100 %

Dari tabel di atas capaian target kinerja pada tahun 2020 mengalami peningkatan dengan Rata2 baik dibandingkan dengan tahun 2019 yang target kinerjanya sangat Buruk.

Analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

➤ Bidang Bina Pengembangan Ekonomi Desa :

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat	229 desa	229 desa	100 %
2.	Jumlah Usaha Desa dan Kelompok Ekonomi yang didampingi	176 kelompok	32 Kelompok	18,19 %
3.	Jumlah Desa yang difasilitasi	24 desa	12 BUMDes	50 %
4.	Jumlah Peserta Bimtek	93 orang	0	0

1. Rapat koordinasi program pemberdayaan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi pengelolaan program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan Desa/Kelurahan yang berdampak pada pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat yang berkelanjutan serta Koordinasi antar OPD terkait dalam pengelolaan program pemberdayaan masyarakat sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Pelaksanaan kegiatan ini tidak mencapai target yang diharapkan karena kehadiran peserta Rakor tidak mencapai target.
2. Pendampingan, pembinaan, monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pada Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat dan UPK (Program Gerbang Emas)yang berdampak pada :
 - Peningkatan Kemampuan UPK dalam pengelolaan Dana Bergulir Gerbang Emas dan peningkatan kinerja UPK dalam mengelola dana bergulir serta pendampingan yang

optimal terhadap masyarakat dalam mengelola dan melakukan pengembalian Dana bergulir dengan tanggung jawab.

- Peningkatan kemampuan kelompok dalam menyusun pembukuan keuangan kelompok.
- 3. Sosialisasi , Pendampingan, Pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait Pembentukan Bumdes , pengelolaan Keuangan dan perkembangan usaha/ aktivitas BUMDEs sudah dilakukan secara maksimal yang berdampak pada terbentuknya BUMDes dan Peningkatan kemampuan Wirausaha serta kemampuan pengurus dalam mengelola unit usaha dan keuangan BUMDes

Walaupun demikian, masih terdapat beberapa kendala, antara lain :

- a. Laporan keuangan belum dibuat secara Valid dan tepat waktu.
- b. Terbatasnya semangat wirausaha dari pengurus dalam mengelola unit usaha yang sudah ada maupun yang belum ada karena terbatasnya kemampuan analisa/kelayakan usaha.
- c. Pengurus BUMDes banyak yang sudah tidak aktif lagi
- d. Terbatasnya modal usaha dan fasilitas pendukung kegiatan usaha BUMDes
- e. Kurangnya dukungan dari masyarakat dalam pengelolaan BUMDEs serta kurangnya pembinaan dan pendampingan dari Pemerintah Desa terhadap pengurus BUMDes

Untuk mengatasi kendala demi tercapainya kinerja secara maksimal perlu adanya :

- a. Rapat koordinasi dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat sebaiknya dilakukan di masing-masing kecamatan dengan jumlah peserta yang lebih maksimal sehingga materi yang dibahas disesuaikan dengan kondisi dan masalah yang dihadapi masing-masing sehingga target yang diharapkan bisa tercapai serta lebih efektif dan efisien.
- b. Pendampingan dan Monev yang intensif dari pemerintah desa serta OPD terkait
- c. Bimtek /pelatihan pengelolaan BUMDes secara intensif bagi pengurus BUMDes yang sudah terbentuk agar dapat meningkatkan kinerja pengurus /pengelola BUMDes
- d. Evaluasi Kinerja pengurus BUMDES dan pergantian pengurus yang tidak aktif

➤ Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terlaksananya Rapat koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat	229 Desa	229 desa	100
2.	Jumlah Usaha Desa dan Kelompok Ekonomi yang didampingi	176 kelompok	32 Kelompok	18,19%

Untuk monitoring dan evaluasi kelompok usaha ekonomi Masyarakat (UKM TTG) telah dilakukan secara baik..

Kendala yang dihadapi adalah :

- 1. Rata –rata kelompok UKM TTG belum termuat dalam surat keputusan kepala desa

2. Ada usaha yang dilakukan namun terkendala pemasaran hasil
3. Pengeloan tidak diikuti dengan pengemasan produk secara baik
4. Kurangnya permodalan dan peralatan untuk kelompok UMKM TTG dan kelompok Ekonomi masyarakat (UKM-TTG)
5. Kurangnya pendampingan dari instansi teknis
6. Kurangnya pelatihan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diharapkan agar Intansi Teknis terus melakukan pendampingan dan evaluasi terhadap kelompok-kelompok usaha ekonomi di desa dan juga bantuan modal usaha yang diberikan Pemerintah harus betul-betul diberikan pada kelompok yang benar-benar mempunyai manajemen usaha yang baik sehingga usaha kelompok dapat berkembang secara baik.

➤ Bidang Bina Kelembagaan Desa

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan	100 orang	0	0
2.	Jumlah desa siaga yang dibina	40 Desa siaga	19 desa siaga	47,5
3.	Jumlah desa siaga yang dibentuk	4 desa siaga	0	0
4	Jumlah kader Posyandu	650 kader	290 kader	44,62 %
5	Frekuensi jambore Kader	2 kali	0	0
6	Frekuensi rakor pokjanal posyandu	2 kali	0	0
7	Jumlah kader PKK yang ditingkatkan	190 orang	95 orang	50 %
8.	Jumlah kelompok UP2K PKK yang dilatih	10 klmpk	10 kelompok	100 %

Pendampingan kelembagaan desa siaga dilakukan untuk mendukung program Pemerintah dalam menggempur stunting di Desa. Melalui kelembagaan Desa siaga diharapkan agar dapat bekerja sama dengan OPD teknis terkait untuk mengurangi angka stunting di kabupaten Folres Timur. Pendampingan dan pembinaan terhadap kader posyandu untuk meningkatkan kapasitas kader posyandu / peningkatan strata posyandu dilakukan terhadap kader-kader yang tersebar di 19 kecamatan dan juga dilakukan lomba posyandu tingkat kabupaten untuk strata Madya, Purnama dan mandiri.

Untuk Pelatihan dan pembinaan bagi Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) sudah dilakukan secara baik tetapi masih banya kendala dan hambatan yang ditemukan yaitu :

1. Kendala pemasaran karena kualitas produk belum mengikuti tran pasar.
2. Kemasan produk belum terlalu menarik

Kegiatan Pelatihan perlu dilakukan secara berkesinambungan agar bisa mendongkrak atau memberdayakan kelompok UP2K PKK ditingkat desa sehingga Kelompok UP2K PKK mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan keahlian dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Untuk

meningkatkan pengetahuan Pengurus TP-PKK desa perlu terus dilakukan pendampingan secara berjenjang dan pelatihan secara berkesinambungan agar TP-PKK kabupaten lebih baik dari waktu ke waktu.

➤ Bidang Bina Penataan Desa

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	% masyarakat yang mengikuti BBGRM	47,57 %	0	0
2.	% Desa peserta lomba	100 % (250 desa/kel)	0	0
3.	Jumlah Desa yang difasilitasi	21 desa	0	0
4.	Jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti Bimtek	50 orang	50 orang	100 %
5.	Terlaksananya pendampingan dan pembinaan terhadap aparat Pemdes dan BPD	229 desa	229 desa	100 %
6.	Jumlah Desa yang didampingi	229 Desa	229 desa	100 %
7.	Terlaksananya Evaluasi Rancangan APBDes	229 desa	229 desa	100 %
8.	Terlaksananya faslitasi dan pendampingan			
9	Terevaluasinya Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDesa	229 desa	229 desa	100%

Pada umumnya pelaksanaan kegiatan berupa pendampingan dan fasilitasi untuk meningkatkan kapasitas paratur pemeritah desa telah dilakukan secara maksimal tetapi masih banyak Kendala-kendala yang dihadapi seperti :

1. Kurangnya pemahaman aparat pemerintah desa terkait tugas dan fungsi
2. Kurangnya pemahaman aparat pemerintah desa terkait pengolaan keuangan karena yang berbasis Aplikasi SISKEUDES
3. Kapasitas dan pengetahuan aparatur pemerintah desa masih terbatas.
4. Penyelesaian dokumen terkait penyusunan RPJM Desa, RKP Desa belum tepat waktu

Untuk itu koordinasi harus lebih diperkuat di tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten guna mencapai target yang sudah ditetapkan dan juga perlu dilakukan Bimtek/pelatihan untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran dan realisasi belanja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2020
Berdasarkan Kelompok Belanja

Uraian	Target (Rp)	Realisasi(Rp)	%
Belanja tidak langsung	1.795.071.526,00	1.733.872.492,00	96,59
Belanja langsung	1.358.004.973,00	1.354.290.146,00	99,73
Jumlah	4.790.213.755,00	3.088.162.638,00	64,47

1. Belanja Langsung.

1) Rincian rencana dan realisasi belanja menurut kelompok belanja :

Anggaran belanja langsung dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa dan modal. Rincian rencana dan realisasi anggaran belanja langsung tahun 2020 ,sebagai berikut:

Rencana dan Realisasi Anggaran Tahun 2020
Berdasarkan kelompok Belanja

Uraian	Target Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	403.240.000,00	402.083.000,00	99,71
Belanja Barang dan jasa	954.764.973,00	952.207.146,00	99,73
Jumlah	1.358.004.973,00	1.354.290.146,00	99,73

Jika dibandingkan Tahun Anggaran 2019, realisasi belanja langsung sebesar Rp. 2.924.341.609,00 (98,42%) dari target sebesar Rp. 2.971.436.695,00, sedangkan penyerapan dana pada belanja langsung untuk tahun anggaran 2020 mengalami penurunan sebesar (Rp.1.570.051.463,00) atau sebesar 53,69 %.

Untuk Program dan Kegiatan yang dibiayai dari APBD I maupun APBN untuk tahun Anggaran 2020 tidak ada.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mencerminkan suatu organisasi yang akuntable untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Terwujudnya *good governance* merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan sistem akuntabilitas yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur

Pada tahun 2020, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur melaksanakan 9 program dan 38 kegiatan dengan penyerapan anggaran sebesar atau Rp. 1.354.290.146,00,- atau 99,73 % dari total Rp. 1.358.004.973,00

Keberhasilan Pencapaian Kegiatan secara efektif dan efisien disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- Perencanaan jumlah anggaran yang memadai dengan rencana tingkat output yang diinginkan.
 - Tersedianya SDM pelaksana yang mempunyai kemampuan baik secara administratif maupun teknis.
- Sedangkan penyebab terjadinya penurunan atau kegagalan pencapaian sasaran diantaranya adalah :
- Terbatasnya dana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan dengan indikator output yang telah direncanakan.
 - Terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah desa dan pelaku - pelaku program/kegiatan
 - Terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kelompok - kelompok usaha ekonomi produktif di desa/kelurahan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dapat diupayakan langkah – langkah sebagai berikut :

- ♦ Meningkatkan ketersediaan dana dan bantuan melalui beberapa sumber pembiayaan antara lain APBD II, APBD I dan APBN.
- ♦ Meningkatkan intensitas kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran terutama kegiatan-kegiatan berupa Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur pemerintah Desa maupun Kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Flores Timur tahun 2020, untuk diketahui.

Larantuka, Januari 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Flores Timur,



Rufus Koda Teluma, S.Sos.

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19690725 199703 1 005

